LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

PEMERINTAH KABUPATEN
PONOROGO

LPPD

AKHIR TAHUN ANGGARAN

DESA : POLOREJO
KECAMATAN : BABADAN
KABUPATEN : PONOROGO



AKHIR TAHUN ANGGARAN **2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Tahun 2025, ini merupakan bahan evaluasi dan tolak ukur dalam menentukan Rencana Kegiatan Tindak Lanjut, bagi Desa Polorejo khususnya dan pada umumnya sebagai bahan kebijakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam menentukan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran berikutnya.

Dalam penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin, terkait dengan proses Penyelenggaraan Pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat di Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo pada Tahun 2025, baik di bidang pelayanan administrasi, pembangunan fisik maupun bidang pembangunan non fisik.

Kamipun menyadari bahwa pada prakteknya dalam proses pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan target yang ditentukan dalam RPJM Desa dan RKP Desa, kami banyak menghadapi kendala, sehingga hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan kami yang masih banyak membutuhkan arahan bimbingan serta pembinaan dari pihak terkait.

Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang kami sampaikan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami membutuhkan koreksi, arahan dan kebijakan inovatif yang pada Tahun Anggaran berikutnya akan membimbing kami pada perubahan yang positif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat, menuju Desa Polorejo sebagai desa yang berkarakter, maju dan reliji. Dan menjadi Desa terkemuka di Kabupaten Ponorogo.

Sebagai awal dari penulisan ini, kiranya tiada kata yang lebih indah untuk dikemukan terlebih dahulu kecuali syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan Maha segala-galanya yang selalu memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kami bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dalam rangka pembuatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) akhirTahun 2025.

Kiranya dimaklumi bahwa penulisan ini disusun dan dibuat dalam rangka pembuatan Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) akhirTahun 2025.

LPPD akhir tahun anggaran 2025 adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Desa Polorejo kepada Bupati Ponorogo sebagai bentuk Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi Laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten selama 1 (satu) tahun anggaran.

Sehubungan dengan telah terselesainya tahunAnggaran 2025, dalam penulisan

ini maka kami tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih :

1. Bapak Bupati Ponorogo;
2. Bapak Camat Babadan dan seluruh stafnya;
3. Ketua BPD dan anggota BPD Desa Polorejo Kecamatan Babadan;
4. Ketua LPMD dan anggota LPMD Desa Polorejo Kecamatan Babadan;
5. Perangkat Desa Polorejo Kecamatan Babadan;
6. Serta semua pihak yang telah membantu terselesainya penulisan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) ini.

Kami sangat menyadari bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) ini masih jauh dari harapan dan banyak kekurangan, oleh karena itu, kami sadar bahwa penulisan ini masih jauh dari yang diharapkan sehubungan itu kami dan seluruh warga masyarakat Desa Polorejo Kecamatan Babadan, senantiasa menerima saran dan kritik, yang sifatnya membangun demi penyempurnaan terhadap segala kekurangan, sehingga berguna dan bermanfaaat sebagai bahan penyempurnaan diwaktu sekarang dan mendatang.

Akhirnya, tak lupa kami ucapkan terima kasih atas segala bimbingan dan pengarahan yang telah diberikan kepada kami.

Polorejo, 16 Februari 2026

Kepala Desa Polorejo

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KEPALA DESA POLOREJO
KECAMATAN BABADAN

HARIYANTO

DAFTAR ISI

SAMPUL i
PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
I. PENDAHULUAN 00
A. Tujuan 00
B. Visi Misi 00
C. Strategi Dan Kebijakan Pembangunan 00
II. PROGRAM KERJA PEMERINTAH DESA 00
A. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 00
B. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan 00
C. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan 00
D. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat 00
E. Program Kerja Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 00
III. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 00
A. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa TahunAnggaran 2025 00
B. Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa TahunAnggaran 2025 00
IV. KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI 00
V. PENUTUP
A. Kesimpulan 00
B. Ucapan Terima Kasih 00
C. Saran 00
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. *Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja DesaTahun 2025 (Format A.1)*
2. *Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja DesaTahun 2025 (Format A.2)*
3. *Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja DesaTahun 2025 (Form B)*
4. *Laporan Rekapitulasi Jumlah Penduduk pada akhir bulan DesemberTahun 2025*

LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LPPD)
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025 DESA POLOREJO KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO

I. PENDAHULUAN

1. *TUJUAN*

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabiltas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan Desa (Asas Akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipertanggung-jawabkan dari berbagai aspek baik secara hukum, administrasi, maupun moral. Pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban Pemerintah Desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelengaraan pemerintahan desa.

Pelaporan ini sebagai salah satu wujud pengendalian pemerintahan Desa untuk:

a. Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan
b. Mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, faktor-faktor berpengaruh, keberhasilan, dan sebagainya) terkait pelaksaan kegiatan Pemerintah Desa.

2. *VISI DAN MISI*

A. VISI DAN MISI

- **Visi Desa**
- ***"Sambung rasa, sambung suara dan sambung karsa untuk membangun desa yang mandiri dan religi."***
- **Misi Desa**

a. Memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan SDM melalui pendidikan formal dan non formal.
b. Mewujutkan pemerintah yang baik, bersih, berwibawa, bermartabat dan religi
c. Mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian masyarakat melalui pemberdayaan pembangunan yang partisipatif pada semua aspek kehidupan masyarakat.
d. Mengembangkan kecakapan dan ketrampilan masyarakat Desa Polorejo

3. *STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN*

a. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

1. *Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;*
2. *Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat;*
3. *Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat;*
4. *Terwujudnya perubahan desa menuju maju dan religi dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;*

b. Arah Kebijakan Keuangan Desa

1. *Belanja Pegawai untuk Kepala Desa;*
2. *Belanja Pegawai untuk dan Perangkat Desa;*
3. *Belanja Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa;*
4. *Belanja Operasional Pemerintah Desa;*

5. *Belanja Tunjangan BPD;*
6. *Belanja Operasional BPD;*
7. *Belanja Penyediaan Operasional dan Insentif RW;*
8. *Belanja Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa;*
9. *Belanaja Tambahan Tunjangan Kepala Desa;*
10. *Belanaja Tambahan Tunjangan Perangkat Desa;*
11. *Tunjangan Kinerja BPD;*
12. *Belanja Jaminan Sosial BPD;*
13. *Belanja Penyusunan, Pendatan, Pemutakhiran data Propil Desa;*
14. *Belanja Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa;*
15. *Belanja Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainya;*
16. *Belanja Penyusunan Dukumen Perencanan Desa;*
17. *Belanja Penyusunan Dukumen Kebijakan Desa;*
18. *Belanja Penyusunan Laporan Kepala Desa;*
19. *Belanja Kegiatan Sosialisasi Program Kegiatan Pemerintah Desa;*
20. *Belanja untuk pengadaan Tanah Desa;*
21. *Belanja Administrasi PBB Tanah Kas Desa;*
22. *Program pelayanan dasar pendidikan;*
23. *Program pelayanan dasar kesehatan;*
24. *Program Peningkatan Jalan Desa;*
25. *Program Pembangunan Prasarana Jalan Desa;*
26. *Program Pengadaan Informasi publik desa;*
27. *Belanja Kegiatan Sujud Syukur HUT RI;*
28. *Belanja Pembinaan LKMD;*
29. *Belanja Pembinaan PKK;*
30. *Belanja Pembinaan, Penguatan Lembaga Rukun Tetangga;*
31. *Belanja Pembinaan Karang Taruna;*
32. *Program Peningkatan Kapasitas Kepala Desa;*
33. *Proram Peningkatan Kapsitas Perangkat Desa;*
34. *Program Peningkatan kapasitas BPD;*
35. *Program PeningkatanKapsitas Apratur Pemerintah Desa Lainya;*
36. *Program Pelatihan Managemen Koperasi UMKM;*
37. *Program Penanggulangan Keadaan Darurat;*
38. *Program Penanggulangan Keadaan Mendesak. BLT Dana Desa.*

c. Kebijakan Umum Anggaran

Secara Umum anggaran Desa Polorejo diprioritaskan untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Anggaran Desa Polorejo dipergunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Kebijakan umum anggaran Desa Polorejo berpedoman pada prinsip- prinsip penganggaran yaitu:

1. <u>Partisipasi Masyarakat</u>

Yang mengandung makna bahwa pengambilan

keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan anggaran.

2. Transparansi Anggaran

   Anggaran yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan, jenis objek belanja, manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

3. Disiplin Anggaran, dalam hal ini *adalah:*
   a) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;
   b) Belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran.

4. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran

   Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat sehingga perencanaan anggaran harus diperhitungkan secara cermat.

II. PROGRAM KERJA PEMERINTAHAN DESA

1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

A. Rencana Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan RKP Desa *sebagai berikut:*

a. Belanja Pegawai untuk Kepala Desa;
b. Belanja Pegawai untuk dan Perangkat Desa;
c. Belanja Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa;
d. Belanja Operasional Pemerintah Desa;
e. Belanja Tunjangan BPD;
f. Belanja Operasional BPD;
g. Belanja Penyediaan Operasional dan Insentif RW;
h. Belanja Tambahan Tunjangan Kepala Desa;
i. Belanja Tambahan Tunjangan Perangkat Desa;
j. Tunjangan Kinerja BPD;
k. Belanja Jaminan Sosial BPD;
l. Belanja Penyusunan, Pendatan, Pemutakhiran data Propil Desa;
m. Belanja Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa;
n. Belanja Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainya;
o. Belanja Penyusunan Dukumen Perencanan Desa;
p. Belanja Penyusunan Dukumen Kebijakan Desa;
q. Belanja Penyusunan Laporan Kepala Desa;
r. Belanja Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa;
s. Belanja Kebiatan Sosialisasi Program Kegiatan Pemerintah Desa;
t. Belanja untuk pengadaan Tanah Desa;

u. *Belanja Administrasi PBB Tanah Kas Desa;*

B. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa *sebagai berikut:*

1. Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

a. *Belanja Pegawai untuk Kepala Desa;*
b. *Belanja Pegawai untuk dan Perangkat Desa;*
c. *Belanja Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa;*
d. *Belanja Operasional Pemerintah Desa;*
e. *Belanja Tunjangan BPD;*
f. *Belanja Operasional BPD;*
g. *Belanja Penyediaan Operasional dan Insentif RW;*
h. *Belanja Tambahan Tunjangan Kepala Desa;*
i. *Belanja Tambahan Tunjangan Perangkat Desa;*
j. *Tunjangan Kinerja BPD;*
k. *Belanja Tunjangan Purna Bakti Perangkat Desa;*
l. *Belanja Jaminan Sosial BPD;*

2. Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
   a) *Pendataan Profil Desa*

3. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
   a) *Belanja Penyusunan, Pendataan, Pemutakhiran data Propil Desa;*
   b) *Belanja Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa;*
   c) *Belanja Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainya;*
   d) *Belanja Penyusunan Dukumen Perencanan Desa;*
   e) *Belanja Penyusunan Dukumen Kebijakan Desa;*
   f) *Belanja Penyusunan Laporan Kepala Desa;*
   g) *Belanja Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa;*
   h) *Belanja Kegiatan Sosialisasi Program Kegiatan Pemerintah Desa.*

4. Pertanahan
   a. *Belanja Administrasi PBB Tanah Kas Desa;*

2. *BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN*

A. Rencana Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa, berdasarkan RKP Desa *sebagai berikut:*

1. *Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan;*
   a) *Belanja ATK.;*
   b) *Honor tenaga pengajar;*
   c) *Belanja prasarana pendidikan.*

2. Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan
   a) *Belanja BOP Pos Kesehatan Desa;*
   b) *Belanja BOP Posyandu;*
   c) *Belanja BOP Desa Siaga Kesehatan;*
   d) *Belanja BOP Bina Keluarga Balita;*

e) Belanja BOP Pelayanan Kesehatan Lingkungan.

3. Sarana Prasarana
   a. Program Peningkatan Jalan Desa;
   b. Program Pembangunan Prasarana Jalan Desa;
   c. Program Pengadaan Informasi publik desa.

B. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa *sebagai berikut:*
   1. Pendidikan
      a) Pengadaan ATK. TK Dharma Wanita;
      b) Penyediaan honor guru;
      c) Pengadaan sarana pendidikan.
   2. Kesehatan
      a) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa;
      b) Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu);
      c) Penyelengaraan Desa Siaga Kesehatan;
      d) Penyelenggaraan Bina Keluarga Balita;
      e) Pemyelenggraaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan.
   3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
      a) Pembangunan/Peningkatan Jalan Kantil Dukuh Tamanan
      b) Pembangunan/Peningkatan Jalan Cempaka G 2/5 Dukuh Polorejo
      c) Pembangunan/Peningkatan Jalan Terate Gang 7 Dukuh Beji;
      d) Pembangunan/Peningkatan Jalan Terate Gang 9 Dukuh Beji;
      e) Pembangunan/Peningkatan Jalan Pudak Dukuh Bakalan;
      f) Pembangunan/Peningkatan Jalan Terate G 3 Dukuh Polorejo;
      g) Pengurukan Lahan KDMP
      h) Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni

   4. Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
      a) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baleho dll)

3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

A. Rencana Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa *sebagai berikut:*
   a. Belanja Kegiatan Sujud Syukur HUT RI;
   b. Belanja Pembinaan LKMD;
   c. Belanja Pembinaan PKK;
   d. Belanja Pembinaan, Penguatan Lembaga Rukun Tetangga;
   e. Belanja Pembinaan Karang Taruna.

B. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa sebagai *berikut:*
   a. Belanja Kegiatan Sujud Syukur HUT RI;
   b. Belanja Pelatihan Pemuda Hebat;
   c. Belanja Pembinaan LKMD;
   d. Belanja Pembinaan PKK;
   e. Belanja Pembinaan, Penguatan Lembaga Rukun Tetangga;
   f. Belanja Pembinaan Karang Taruna.

4. ***BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT***

A. Rencana Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa *sebagai berikut:*

a. Program Peningkatan Kapasitas Kepala Desa;
b. Proram Peningkatan Kapsitas Perangkat Desa;
c. Program Peningkatan kapasitas BPD;
d. Program PeningkatanKapsitas Apratur Pemerintah Desa Lainya;
i. Program Pelatihan Managemen Koperasi UMKM

B. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa *sebagai berikut:*

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

a. Program Peningkatan Kapasitas Kepala Desa;
b. Proram Peningkatan Kapsitas Perangkat Desa;
c. Program Peningkatan kapasitas BPD;
d. Program PeningkatanKapsitas Apratur Pemerintah Desa Lainya;
e. *Program Pelatihan Managemen Koperasi UMKM*

5. ***BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA***

A. Rencana Program Kerja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa *sebagai berikut:*

1. Kegiatan Penanggulangan Bencana Non Alam,
2. Penanggulangan Keadaan Darurat.
3. BLT Dana Desa.

B. Program Kerja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa *sebagai berikut:*

1. Penanggulangan Bencana
   Belanja Penanggulangan Bencana .
2. Penanggulangan Keadaan Mendesak
   Belanja Tak Terduga BLT DD

III. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

1. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025

   Pelaksanaan Aggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Polorejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang *Perubahan kedua* Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Angaran **2025**

   Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Polorejo Tahun Anggaran 2025, dengan rincian *terlampir pada format A.1*

2. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025

   Peraturan Desa Polorejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Laporan Pertanggunjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TahunAnggaran 2025, *dengan rincian terlampir pada format B*

IV. KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Adapun keberhasilan dan permasalahan serta solusi yang mucul dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten

Ponorogo, dapat diurai dalam tabel *dibawah ini:*

NO	BIDANG	KEBERHASILAN YANG DICAPAI	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	SOLUSI/UPAYA YANG DITEMPUH
1.	Bidang Pelaksanaan Pemerintahan Desa	a) Pengelolaan dan penatausahaan administrasi Desa. b) Peningkatan Operasional Pemerintah Desa.	a) Kurangnya Pemahaman Peraturan Perundang undangan tentang Tata Kelola Kepemerintahan Desa. b) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) para Aparatur Pemerintah Desa	a) Pengadaan Dokumen Peraturan Perundang Undangan Tentang Tata Kelola Kepemerintahan Desa. b) Pelatihan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	a) Tersedianya Jaringan Irigasi yg bersih dan lancer b) Tersedianya Jalan Pemukiman Jalan Kantil yang bersih dan indah c) Tersedianya Jalan Pemukiman Jalan Terate Gang I yg bersih dan indah d) Tersedianya Jalan Pemukiman Jalan Mojo yang bersih dan indah e) Tersedianya Jalan Pemukiman Jalan Anggrek yang bersih dan indah f) Tersedianya Jaringan Irigasi yg bersih dan lancer	a) Kondisi jaringan irigasi yang dangkal dan mampet b) Kondisi jalan Rusak c) Kondisi Jalan Rusak d) Kondisi Jalan Rusak e) Kondisi Jalan Rusak f) Kondisi jaringan irigasi yang dangkal dan mampet	a) Normalisasi Jaringan Irigasi b) Pembanguna/ Penigkatan Jalan Pavingisasi c) Peningkatan Jalan/Pavingi Jalan d) Pembangunan / Penigkatan Jalan Pavingisasi e) Pembangunan / Penigkatan Jalan Pavingisasi f) Pembangunan Jaringan Irigasi Pertanian
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	a) Tersedianya Tenaga Keamanan yg trampil dan cekatan, siap siaga b) Pembinanan LPMD c) Pembinaan PKK d) Penguatan Lembaga RT e) Kegiatan peringatan HUT RI ke 79	a) Kurangnya minat pemuda untuk ikut serta dalam pelaksanaan b) ……. c) …… d) …… e) ……..	a) Pelatihan peningkatan kapasitas Tenaga Keamanan b) Pemberian Honor Penguru LPMD c) Pemberian Honor Pengurus PKK d) Pengalokasian dana untuk RT e) Pelaestarian Budaya dan peringan hari besar nasional

4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	a) Peningkatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	a) Kurangnya pemahaman tugas pokok masing masing dan SDM yang urang memadai	a) Dilaksakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
5	Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa	a) Kegiatan Penanggulangan Bencana Desa. b) Kegiatan Mendesak Desa.	a) …… b) ……	a) Penyediaan Pos Anggaran Penanggulangan Bencana b) Penyaluran BLT DD

V. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Mengacu pada Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, pada pasal 3 poin 1 *"Laporan penyelenggaraan pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati/walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran".*

Laporan dan Pertanggungjawaban adalah babakan terakhir dalam siklus Pengelolaan Keuangan Desa. Maka kami menyampaikan hal-hal pokok kesimpulan sebagai mana terurai dalam laporan ini:

a. Dasar Hukum Pelaporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun
b. Tahapan perencanaan yang merujuk pada RKP Desa Polorejo
c. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Program Kegiatan Desa Polorejo Tahun Anggaran 2025 berdasarkan APB Desa
d. Capaian keberhasilan, masalah dan penyelesaian masalah yang terjadi di Desa Polorejo

2. *UCAPAN TERIMAKASIH*

Tak lupa kami sampaikan banyak terima kasih kepada unsur yang terlibat membantu dalam penyelesaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Polorejo Akhir Tahun Anggaran 2025, Baik dari Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan terkhusus kepada Pendamping Lokal Desa Polorejo

3. *SARAN*

Demi kelancaran Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana diatur Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, maka kami dari Pemerintah Desa menyarankan agar Kabupaten / Dinas terkait untuk meningkatkan kapasitas Aparat Desa, terkhusus pengelola keuangan dan Tim Penyusun LPPD di Desa.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2025 ini dibuat sebagai bahan seperlunya.

Polorejo, 16 Februari 2026
Kepala Desa Polorejo

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KEPALA DESA POLOREJO
KECAMATAN BABADAN

HARIYANTO

A.1. Format Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja DesaTahun 2025

I.	**PENDAPATAN**	
	– Pendapatan Asli Desa	529.443.000,00
	– Pendapatan Transfer	1.687.206.052,00
	a. Dana Desa	985.483.000,00
	b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	79.321.944,00
	c. Alokasi Dana Desa	622.401.108,00
	d. Bantuan Keuangan Provinsi	0,00
	e. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	0,00
	– Pendapatan Lain-lain	20.450.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	**2.237.099.052,00**

II.	**BELANJA**	
	– Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa	1.106.442.986,43
	– Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	928.352.500,00
	– Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	235.263.726,00
	– Bidang Pemberdayaan Masyarakat	192.813.000,00
	– Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	69.800.000,00
	JUMLAH BELANJA	2.532.672.212,43

SURPLUS / DEFISIT (I - II)	(295.573.160,43)

III.	PEMBIAYAAN	
	– Penerimaan Pembiayaan	295.573.160,43
	– Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	295.573.160,43

SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN	**0,00**

Polorejo, 16 Februari 2026
Kepala Desa Polorejo

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KEPALA DESA POLOREJO
KECAMATAN BABADAN

HARIYANTO

A.2. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja DesaTahun 2025

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025
PEMERINTAH DESA POLOREJO

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
			SEMULA	MENJADI		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	529.443.000.00	555.255.000.00	25.812.000,00	
	4.1.1	Hasil Usaha Desa	0,00	0,00	0,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	529.443.000.00	555.255.000.00	25.812..000.00	
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	0,00	0,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.687.206.052,00	1.486.925.011,00	200.281.041,00	
	4.2.1.	Dana Desa	985.483.000,00	726.574.900,00	258.908.100,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	79.321.944,00	89.236.619,00	9.914.675,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	622.401.108,00	671.113.492,00	48.712.384,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	0,00	0,00	0,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	20.450.000,00	29.288.885,40	8.838.885.40	
	4.3.4	Penerimaan Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	0,00	15.300.000,00	15.300.000.00	
	4.3.5	Penerimaan dari koreksi Belanja tahun sebelumnya	5.380.000,00	10.218.885,40	4.838.885,40	
	4.3.6.	Bunga Bank	3.770.000,00	3.770.000,00	0,00	
	4.3.9	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	11.300.000,00	0,00	(11.300.000.00)	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.237.099.052,00	2.071.468.896,00	(165.630.155,60)	
	2.	BELANJA				
1.		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.106.442.986,43	1.142.490.930,83	36.047.944,40	
1.1		Penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan dan operasional pemdes	1.012.988.241,00	1.057.331.685,40	44.343.444,00	
1.2		Penyediaan sarana dan prasrana desa	2.378.000,00	2.378.000,00	0,00	
1.4		Penyelenggaraan tata praja pemerintahan	32.444,777,40	31.664.777,40	(780.000,00)	
1.5		Kegitan pertanahan	58.631.968,00	51.116.468,00	(7.515.500,00)	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	928.352.500,00	870.997.000,00	(57.335.5000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
			SEMULA	MENJADI		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
2.1		Pendidikan	14.900.000,00	6.700.000,00	(8.200.000,00)	
2.2		Kesehatan	287.477.500,00	221.119.500,00	(66.358.000,00)	
2.3		Pekerjaan umum dan penataan ruang	610.340.000,00	630.542.500,00	20.202.500,00	
2.4		Kawasan Permukiman	12.635.000,00	12.635.000,00	0,00	
2.6		Perhubungan komonikasi dan informasi	3.000.000,00	0,00	(3000.000,00)	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	235.263.726,00	236.348.626,00	1.084.900,00	
3.1		Ketertiban dan Ketentraman Umum	9.500.000,00	0,00	(9.500.000,00)	
3.2		Kebudayaan dan Agama	78.044.726,00	78.794.726,00	750.000,00	
3.3		Kepemudaan dan Olah Raga	13.350.000,00	6.500.000,00	(6.500.000,00)	
3.4		Kelembagaan Masyarakat	134.369.000,00	151.053.900,00	16.684.900,00	
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	192.813.000,00	31.208.000,00	(161.605.000,00)	
4.2		Pertanian dan Peternakan	158.130.000,00	0,00	(158.130.000,00)	
4.3		Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	23.733.000,00	28.708.000,00	4.975.000,00	
4.4		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.950.000,00	0,00	(4.950.000,00)	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	69.800.000,00	69.800.000,00	0,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	5000000,00	0,00	
		Kegiatan Penanggulangan Bencana	0,00	0,00	0,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	0,00	0,00	0,00	
		Penanganan Keadaan Darurat	0,00	0,00	0,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00	
		Penyaluran BLT DD	0,00	0,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	2.532.672.212,43	2.350.844.556,83	(181.827.665,60)	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(295.573.160,43)	(279.375.660,43)	16.197.500,00	
		PEMBIAYAAN				
		Penerimaan Pembiayaan	295.573.160,43	295.573.160,43	0,00	
		SILPA Tahun Sebelumnya	295.573.160,43	295.573.160,43	0,00	
		Pengeluaran Pembiayaan	0,00	16.197.500,00	16.197.500,00	
		Penyertaan Modal Desa	0,00	16.197.500,00	16.197.500,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
			SEMULA	MENJADI		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		PEMBIAYAAN NETTO	295.573.160,43	279.375.660,43	**16.197.500,00**	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Polorejo, 16 Februari 2025

Kepala Desa Polorejo

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KEPALA DESA POLOREJO
KECAMATAN BABADAN

HARIYANTO

B. Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja DesaTahun 2025

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA POLOREJO
TAHUN ANGGARAN 2025

Realisasi s.d 31/12/2025

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/(KURANG) (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	**PENDAPATAN**			
4.1.	**Pendapatan Asli Desa**	555.255.000,00	554.755.000,00	500.000,00
4.1.1	Hasil Usaha Desa	0,00	0,00	0,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa	555.255.000,00	554.755.000,00	500.000,00
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	0,00	0,00	0,00
4.2.	**Pendapatan Transfer**	1.486.925.011,00	1.482.207.221,00	4.717.790,00
4.2.1.	Dana Desa	726.574.900,00	726.574.900,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	89.236.619,00	89.236.619,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	671.113.492,00	666.395.702,00	4.717.790,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	0,00	0,00	0,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
4.3.	**Pendapatan Lain-lain**	29.288.885,40	21.103.981,71	8.184.903,69
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	0,00	0,00	0,00
4.3.2	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga	15.300.000,00	7.952.583,00	7.347.417,00
4.3.5	Koreksi Belanja Tahun sebelumnya	10.218.885,40	10.802.807,00	0,00
4.3.6.	Bunga Bank	3.770.000,00	2.932.513,31	837.486,69
4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	**2.071.468.896,40**	**2.058.066.202,71**	**13.402.693,69**
5.	**BELANJA**			
5.1.	***Belanja Pegawai***	**937.189.674,00**	**932.078.710,00**	**5.110.964,00**
5.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	121.968.000,00	121.968.000,00	0,00
5.1.2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	746.216.710,00	746.216.710,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/(KURANG) (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
5.1.3	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	7.450.964,00	2.340.000,00	5.110.964,00
5.1.4	Tunjangan BPD	61.554.000,00	61.554.000,00	0,00
5.2.	*Belanja Barang dan Jasa*	687.658.382,83	654.797.800,00	32.860.582,83
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	254.296.914,83	235.114.000,00	19.182.914,83
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	101.695.000,00	98.515.000,00	3.180.000,00
5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	116.625.000,00	111.275.000,00	5.350.000,00
5.2.4	Belanja Jasa Sewa	41.600.000,00	41.350.000,00	250.000,00
5.2.5	Belanja Operasional Perkantoran	152.891.468,00	148.293.800,00	4.597.668,00
5.2.6	Belanja Pemerliharan	2.650.000,00	2.500.000,00	150.000,00
5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yg diserahkan Masyarakat	17.900.000,00	17.750.000,00	150.000,00
5.3.	Belanja Modal	656.196.500,00	652.634.000,00	3.562.500,00
5.3.1	Belanja Modal Tanah	51.360.000,00	51.360.000,00	0,00
5.3.2	Belanja Modal Peralatan Mesin	15.654.000,00	13.276.000,00	2.378.000,00
5.3.4	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman	18.034.000,00	17.756.000,00	278.000,00
5.3.5	Belanja Modal Prasarana Jalan	571.148.500,00	570.242.000,00	906.500,00
5.3.6	Belanja Modal Jembatan	0,00	0,00	0,00
5.3.7	Belanja Modal Irigasi	0,00	0,00	0,00
5.3.9	Belanja Modal lainya	0,00	0,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	69.800.000,00	64.800.000,00	5.000.000,00
5.4.1	Belanja Tidak Terduga	69.800.000,00	64.800.000,00	5.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	2.350.844.556,83	2.304.310.510,00	46.534.046,83
	SURPLUS / (DEFISIT)	(279.375.660,43)	(246.244.307,29)	(33.131.353,14)
6	PEMBIAYAAN			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	295.573.160,43	295.573.160,43	0,00
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	295.573.160,43	295.573.160,43	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/(KURANG) (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Pengeluaran Pembiayaan	16.197.500,00	16.197.500,00	0,00
	Penyertaan Modal Desa	16.197.500,00	16.197.500,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	279.375.660,43	279.375.660,43	0,00
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	33.131.353,14	(33.131.353,14)

Polorejo, 16 Februari 2026
Kepala Desa

HARIYANTO

REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK
TAHUN 2025

DESA : POLOREJO
KECAMATAN : BABADAN
KABUPATEN : PONOROGO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	URAIAN	JUMLAH	
1.	**PENDUDUK AWAL**		
	a. Laki-laki	2.405	Orang
	b. Perempuan	2.352	Orang
	Jumlah (a + b)	***4.757***	*Orang*
2.	**LAHIR**		
	a. Laki-laki	0	Orang
	b. Perempuan	0	Orang
	Jumlah (a + b)	*0*	*Orang*
3.	**MATI**		
	c. Laki-laki	15	Orang
	d. Perempuan	25	Orang
	Jumlah (a + b)	*40*	*Orang*
4.	**DATANG**		
	e. Laki-laki	12	Orang
	f. Perempuan	10	Orang
	Jumlah (a + b)	*22*	*Orang*
5.	**PINDAH**		
	g. Laki-laki	17	Orang
	h. Perempuan	16	Orang
	Jumlah (a + b)	*33*	*Orang*
6.	**PENDUDUK AKHIR**		
	i. Laki-laki	2.385	Orang
	j. Perempuan	2.321	Orang
	Jumlah (a + b)	***4.706***	*Orang*

NO.	MUTASI ANTAR	PINDAH			DATANG		
		L	P	L + P	L	P	L + P
1.	DESA	4	2	5	1	1	2
2.	KECAMATAN	8	9	17	3	4	7
3.	KABUPATEN	3	2	5	2	3	5
4.	PROVINSI	2	3	5	6	2	8
5.	NEGARA	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	**17**	**16**	**33**	**12**	**10**	**22**

Polorejo, 16 Februari 2026
Kepala Desa Polorejo

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KEPALA DESA POLOREJO
KECAMATAN BABADAN

HARIYANTO

REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK
TAHUN 2025

DESA : POLOREJO
KECAMATAN : BABADAN
KABUPATEN : PONOROGO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	URAIAN	JUMLAH			
1.	**BERDASARKAN KEWARGANEGARAAN**				
	A. WNI				
	– Laki-laki	2.405	Orang		
	– Perempuan	2.352	Orang		
	Jumlah			***4.757***	***Orang***
	B. WNA				
	– Laki-laki	0.000	Orang		
	– Perempuan	0.000	Orang		
	Jumlah			***00.000***	***Orang***
	C. WNI + WNA				
	– Laki-laki				
	– Perempuan	2.405	Orang		
		2.352	Orang		
	Jumlah			***4.757***	***Orang***
	D. Jumlah Penduduk Berdasarkan Keawarganegaraan				
	– Laki-laki				
	– Perempuan	2.405	Orang		
		2.352	Orang		
	Jumlah (A+B+C)			***4.757***	***Orang***
2.	**BERDASARKAN AGAMA**				
	A. Islam				
	– Laki-laki	2.405	Orang		
	– Perempuan	2.352	Orang		
	Jumlah			***4.757***	***Orang***
	B. Kristen				
	– Laki-laki	0.000	Orang		
	– Perempuan	0.000	Orang		
	Jumlah			***00.000***	***Orang***
	C. Katholik				
	– Laki-laki	0.000	Orang		
	– Perempuan	0.000	Orang		
	Jumlah			***00.000***	***Orang***
	D. Hindu				
	– Laki-laki	0.000	Orang		
	– Perempuan	0.000	Orang		
	Jumlah			***00.000***	***Orang***
	E. Budha				
	– Laki-laki	0.000	Orang		
	– Perempuan	0.000	Orang		
	Jumlah			***00.000***	***Orang***
	F. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama				
	– Laki-laki				
	– Perempuan	2.405	Orang		2.405
		2.352	Orang		2.352
	Jumlah (A+B + C+ D+E+F)			***4.757***	
3.	**TOTAL PENDUDUK**				
	– Laki-laki				
	– Perempuan	2.405	Orang		2.405
		2.352	Orang		2.352
	Jumlah			***4.757***	

Polorejo, 16 Februari 2026
Kepala Desa Polorejo

HARIYANTO